BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI EKONOMI LUAR NEGERI CHINA

China merupaka negara yang cukup unik karena sistem pemerintahan negaranya. Terlebih karena memilki wilayah yang sangat luas serta masih bertahan sebagai negara komunis hingga saat ini. Dalam BAB ini akan dijelaskan tentang profil negara China yang meliputi wilayah China serta penjelasan singkat tentang makna bendera dan lambang negara China. Kondisi Politik serta Kondisi Ekonomi China juga akan dibahas dalam bab ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang beberapa Kebijakan dan strategi ekonomi Luar Negeri China.

A. Profil Negara China

China merupakan negara yang memiliki dua sistem. Dimana sistem politiknya cenderung sosialis dengan menganut paham komunis sedangkan dalam sistem ekonominya, China menggunakan sistem kapitalis dan cenderung lebih liberal. Memiliki ibu kota yang terletak di Beijing, China merdeka pada 1 Oktober 1949 dan merupakan negara yang memiliki populasi terbesar di dunia sekaligus merupakan salah satu Negara terbesar di dunia dengan luas wilayahnya yang sebesar 9.596.960 km2. Luas wilayah ini menjadikan China sebagai negara terbesar ke-4 di dunia setelah Rusia, Kanada dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk China yang mencapai 1,3 milyar jiwa dan merupakan yang terbesar di dunia. Negara China terletak di Asia Timur. Secara geografis, negara China terletak antara 180 Lintang Utara (LU) sampai 540 Lintang Utara (LU) dan 730 Bujur Timur (BT) sampai 1350 Bujur Timur (BT). China berbatasan dengan Mongolia di sebelah Utaranya sedangkan di sebelah Selatannya berbatasan dengan Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos dan Vietnam. Di Sebelah Timur China berbatasan dengan Korea Utara dan

sebelah Barat berbatasan dengan Pakistan, Kirghistan, Kazakhtan dan Tajikistan.

China sering disebut sebagai negeri Tirai Bambu atau Tiongkok. Saat ini Presiden China yang menjabat adalah Xi Jinping dan telah terpilih sejak tahun 2013. Negara dengan mata uang Yuan ini dikenal membudidayakan panda dimana panda merupakan hewan yang melambangkan negeri Tirai Bambu tersebut. Peta wilayah China dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Peta Wilayah Negara China
Sumber : www.portalilmu.com

1. Bendera dan Lambang Negara China

Bendera dan lambang negara merupakan sesuatu yang sangat penting bagi sebuah negara. Karena bendera dan lambang negara merupaka simbol dan ciri dari negara tersebut. bahkan benderan dan lambang negara terkadang memiliki makna historis bahkan menggambarkan sistem dan ideologi yang di anut negara tersebut. China merupakan negara komunis yang masih bertahan hingga masa kini. Bendera dan lambang negaranya menyimpan arti yang sangat luas.

Gambar 2.2
Bendera Negara China
Sumber : www.portalilmu.com

Bendera China di namakan sebagai Bendera Merah Lima Bintang. Bendera Merah Lima Bintang melambangkan tentang Revolusi yang dilakukan oleh Rakyat China yang saat itu saling bersatu padu. Bendera China tersebut memiliki lambang komunisme yang sangat kental dengan ditandai warna merah serta bintang berwarna kuning. Dalam lambang bendera China terdapat lima bintang dimana salah satunya memiliki ukuran paling besar. Bintang besar tersebut di artikan sebagai kepemimpinan partai komunis di China, sedangkan empat bintang kecil lainnya melambangkan tentang empat kelas yang di wujudkan kedalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan paham komunis.

Empat kelas masyarakat tersebut terdiri dari petani, pekerja, golongan kaya dan para kapitalis yang patriotik. Namun terdapat pendapat lain tentang arti lima bintang tersebut yang menyatakan bahwa bintang terbesar melambangkan kaum yang mayoritas di negara China yaitu Han China, sedangka empat bintang lainnya melambangkan kaum minoritas di China seperti Tiber, Manchu, Uigur dan Mongol.

Gambar 2.3
Lambang Negara China
Sumber : www.portalilmu.com

Lambang Republik Rakyat China ini di resmikan sebagai lambang resmi negara China pada 20 September 1950. Lambang tersebut mengandung makna sebagai representasi gerbang Tiannamen. Gerbang Tiannamen adalah pintu masuk ke dalam Bandar terlarang di Beijing. Kemudian diatas gerbang Tiannamen terdapat lima bintang yang dapat ditemukan juga di dalam bendera China. Dalam lambang negara China, arti dari kelima bintang tersebut sama dengan yang ada di dalam bendera China. Yang mana memiliki dua pendapat dalam pengartiannya. Yaitu melambangkan lima kelas dan melambangkan lima kaum yang saling bersatu padu di dalam China. Terdapat bulatan merah yang dikelilingi oleh gandum emas yang mengartikan adanya revolusi pertanian yang di ambil dari falsafah Mao. Roda gigi yang terdapat di bagian bawah melambangkan perindustrian. Kemudian elemen yang terdapat di dalam jata merupakan simbol perjuangan rakyat China sejak pergerakan empat Mei tapatnya pada tahun 1919. Dimana pada saat itu terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa China yang memprotes respon lemah pemerintah China terhadap Perjanjian Versailles, terutama mengizinkan Jepang untuk memperoleh wilayah di Shandong

yang telah diserahkan oleh Jerman setelah Pengepungan Tsingtao. Demonstrasi empat Mei memicu protes nasional dan menandai bangkitnya nasionalisme di China, sebuah pergeseran menuju mobilisasi politik dan jauh dari aktivitas budaya. Banyak pemimpin politik dan sosial pada dekade berikutnya muncul saat itu. Elemen di dalam jata tersebut juga melambangkan tentang bergabungnya rakyat dan proletariat yang berjaya dalam membangun China bersama – sama.

2. Kondisi Politik China

Republik Rakyat China adalah negara sosialis diktator demokrasi rakyat di bawah pimpinan kelas buruh dengan persekutuan buruh dan tani sebagai dasarnya. Sistem sosialis adalah sistem pokok Republik Rakyat China. Secara resmi RRC masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya sebagai negara komunis. Tidak bisa dipastikan mengenai ideologi apa yang yang dianut oleh negara ini, karena strukturnya tidak diketahui secara pasti. Salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan ini adalah sejarah dari China itu sendiri. China merupakan negara yang diperintah oleh kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu setelah 1911, China diperintah secara otokratis, setelah 1949 partai komunis China mulai memegang pucuk kekuasaan. (Naomi S, 2010)

The Chinese Communist Party (CCP) atau Partai Komunis China telah berkuasa di China selama 63 tahun lamanya. Partai Komunis China mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949 dengan memenangkan perang sipil atas kekuatan Nasionalis yang dimenangkan oleh Chiang Kai-shek, yang saat itu memindahkan posisi Republik China ke pulau Taiwan. Komunis menamai dan menyebut rezim baru mereka dengan Republik Rakyat China (RRC). Meskipun Partai Komunis China terus berkuasa, institusi – institusi politik dan budaya politik China telah berkembang secara signifikan selama dekade – dekade tersebut. (Lawrence & Martin, 2013)

Rezim PKC (Partai Komunis Cina) sangat otokratis, komunis dan sosialis. Partai ini juga sering dikatakan sebagai kerajaan komunis. Negara-negara yang berideologi komunis memberi julukan kepada China sebagai negara kapitalis. Memang, negara China semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan, pemerintah menggariskan administrasi negara berdasarkan demokrasi, meskipun keadaan sebenarnya China tetap menganut paham atau ideologi komunis. Walaupun terdapat gerakan ke arah liberalisasi, seperti penghulu yang sekarang diadakan di tingkat distrik atau wilayah yang kecil dan sebagian badan perwakilan menunjukkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, partai ini terus memiliki kekuatan dalam pemerintahan terutama atas pemilihan jabatan-jabatn pemerintahan. Walaupun negara memakai sistem otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, namun partai ini pada masa yang sama juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintahan secara lebih adil. Penyaringan terhadap praktek politik juga rutin, dan RRC secara keras menghapuskan protes atau organisasi apapun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Tianarumen pada tahun 1989. Akan tetapi, media di negara ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala-gejala korupsi di tingkat bawahan pemerintahannya. RRC juga berhasil menghalangi gerakan media informasi, dan ada waktunya juga mereka akan menurunkan polisi untuk menghadang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang melakukan protes. Walaupun penentangan berstruktur terhadap China tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin diberi kebebasan. (Lawrence & Martin, 2013)

Partai mengawasi dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat di China. apa yang mereka pelajari di sekolah dan tonton di TV, pekerjaan, dan perumahan, bahkan

hingga jumlah anak yang diizinkan. Kelompok elite yang sebagian besar terdiri dari pejabat pemerintah, perwira militer, dan publik figur. Bahkan pebisnis kini juga diundang untuk bergabung dalam jajaran petinggi partai. Bergabung dengan partai membawa hak istimewa yang signifikan, yang menjelaskan mengapa keanggotaan terus meningkat. Anggota partai dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan baik, anak-anak mereka mendapatkan fasilitas pendidikan lebih baik dan juga banyak pekerjaan yang hanya terbuka untuk anggota partai. Hal yang paling signifikan di China adalah hubungan pribadi sering lebih penting daripada kemampuan, anggota mendapatkan akses pada jaringan dengan para pembuat keputusan yang mempengaruhi karir, hidup, atau bisnis mereka. (Lawrence & Martin, 2013)

Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Saat ini China dipimpin oleh seorang Presiden yaitu Xi Jinping. Xi Jinping telah menjabat sejak tahun 2013. Xi terkenal dengan kampanyenya yaitu pemberantasan korupsi. Xi melancarkan perang terhadap korupsi dan mengeluarkan aturan untuk menghapus apa yang digambarkan sebagai 'pemborosan uang negara'. Makanya ia sering terlihat bepergian bersama pejabat lain dengan mobil biasa, bukan dengan iring-iringan sedan mewah. Di bawah Xi, pesta besar-besaran yang sering digelar pejabat dilarang. Beberapa pejabat penting yang dinyatakan korupsi diadili, dipecat dan dipenjara. (BBC, 2017)

3. Kondisi Ekonomi China

China merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2016 Pendapatan Bruto Domestik atau PDB China adalah sebesar USD 12 Triliun. Saat ini China dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang patut untuk di perhitungkan. China memiliki hasil pertanian seperti beras, jagung, kacang – kacangan, kedele, gula, teh, kapas, dan tali rami. Memiliki hasil industri tekstil, baja, semen, plastik dan juga mobil. Untuk sumber daya alamnya China mempunyai minyak tungsten, antimonium, batu bara, timah, mangan, merkuri.

Dalam perekonomiannya, China menerapkan sistem kapitalis yang cenderung lebih bebas. Dimana dengan sistem kapitalis, China dapat lebih maju dari masa sebelumnya. Dimana China belum menerapkan sistem kapitalis yang terbuka seperti saat ini. Deng Xiaoping adalah pencetus reformasi ekonomi. Deng menggantikan Mao memimpin China setelah Mao wafat. Dalam reformasi ekonominya, Deng menitik beratkan kepada pendekatan yang lebih praktis terhadap pembangunan. Deng menyadari kelemahan dari reformasi ekonomi ala Mao. Format ekonomi baru yang dia canangkan didasarkan ada pemikiran bahwa ekonomi sosialis yang yang selama ini dianut China adalah salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan. Deng yang memimpin China setelah Mao wafat pada 1976, meyakinkan seluruh China bahwa sosialisme dan ekonomi pasar bukan dua hal yang bertentangan. Bahkan Deng pernah berkata "saripati dari sosialisme yang sesungguhnya adalah pembebasan dan pembangunan sistem produksi". (Historia, 2011)

China membangun sebuah "ekonomi pasar sosialis", sebuah sistem ekonomi dimana kepemilikan publik merupakan arus utama, disamping itu perusahaan – perusahaan negara yang ada dikembangkan agar mendapat untung dan efisien seperti perusahaan – perusahaan swasta. Dalam jangka panjang, China dengan pintu investasi asing dan campur tangan negara telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi China. Deng menyebut program reformasinya sebagai gaige kaifang reformasi dan membuka diri dengan menggabungkan sistem sosialisme yang sudah mendarah daging dengan sisi positif kapitalisme. Sistem ekonomi yang sebagai hasil dari penggabungan yang dikenal sebagai "sosialisme dengan karakteristik China". (Bowono, 2008)

Sejak saat itu perkembangan ekonomi China berkembang relatif cepat sejak berdirinya Republik ini pada tahun 1949. Adanya reformasi ekonomi pada tahun 1978 dibawah pimpinan Deng Xiaoping dan keterbukaannya pada dunia luar, menjadikan negara ini memiliki kekuatan ekonomi yang kuat dengan ekspansi yang luar biasa dari sektor

wiraswasta dan upayanya dalam menarik investasi asing. Deng Xiaoping dan para pemimpin China juga menegaskan keinginannya untuk menjadikan China sebagai negara kuat yang memiliki pengaruh besar bagi dunia dan berperan penting dalam urusan internasional di masa yang akan datang. Dengan perekonomiannya yang semakin maju, China memiliki strategi pembangunan ekonomi yang dijalankan melalui:

1. Prioritas arah perekonomian China dialihkan dari industri berat yang kerakyatan.
2. Struktur perekonomian disusun kembali dengan penyederhanaan dan penghapusan-penghapusan birokrasi yang tidak efektif.
3. Wewenang perusahaan dikelola oleh jajaran perusahaan bukan oleh negara.
4. Mendorong perusahaan untuk dapat menghasilkan *output* yang mempunyai daya saing dan berkualitas. (Naomi S, 2010)

Dalam reformasi ekonomi yang di prakarsai oleh Deng Xiaoping tersebut, membuat China menjadi negara industri yang maju. Sejak tahun 1980-an, perekonomian China rata – rata tumbuh sebanyak 10% membuat China bangkit menjadi negara yang *super power* baru yang secara geopolitik menjadi ancaman bagi negara – negara industri yang lain. Bahkan pada tahun 2006 surplus perdagangan China dengan negara – negara di dunia mencapai 177,47 miliar dollar AS, China akan mengekspor lebih banyak dari pada yang telah di impor pada tahun – tahun mendatang. Tidak hanya disitu China pun memproteksi mata uangnya renminbi (RMB; yuan), mempertahankan nilai tukarnya yang rendah terhadap mata uang lain guna memastikan bahwa ekspor China menjadi lebih mudah secara global. (Mittler, 2011)

China saat ini bahkan menjadi aktor ekonomi terbesar di Asia menjadi yang kedua setelah Amerika Serikat. Saat ini China semakin terbuka. China mendorong para pengusahanya untuk keluar dari China untuk memperluas usahanya dengan melakukan investasi keluar negeri. China memperluas pengaruhnya dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi yang

dilakukan dengan melalui kerjasama perdagangan, investasi, bantuan infrastruktur serta strategi ekonomi.

B. Kebijakan dan Strategi Ekonomi China dalam Mendorong Investasi

Kebijakan ekonomi luar negeri dibuat agar suatu negara dapat dengan lebih mudah untuk melakukan kerjasama dan kegiatan ekonomi di luar negeri. Strategi – strategi ekonomi dikerahkan oleh pemerintah untuk menjalin kerjasama, investasi bahkan memanggil para investor ke negara mereka. China merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kebijakan luar negeri pada bidang ekonomi. Dengan kebijakan serta strategi ekonominya, China dapat menjadi negara industri yang besar seperti sekarang ini. Semenjak adanya reformasi ekonomi yang membuat perekonomian China cenderung lebih liberal, banyak kebijakan serta strategi ekonomi dibuat untuk memperlancar masalah ekonomi seperti investasi dan perdagangan luar negeri. Berikut beberapa kebijakan dan strategi luar negeri pada bidang ekonomi China :

1. Open Door Policy

Open door policy atau kebijakan pintu terbuka yang dibuat oleh Deng Xiaoping merupakan tanda dimulainya reformasi ekonomi di China. *Open door policy* merupakan strategi politik luar negeri China untuk melakukan modernisasi ekonomi dan untuk menjaga lingkungan agar tetap kondusif dalam usaha pembangunan ekonomi dan untuk memperluas pasar bagi produk ekspornya ekspor led growth. Strategi penerapan kebijakan ekonomi China adalah *outward working*.

Pasca digulirkannya kebijakan *open door policy*, secara bertahap investasi mulai masuk yang diikuti dengan adanya transfer teknologi. teknologi telah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan ekonomi Cina. karena melalui teknologi, pemerintah Cina menjadikan negaranya mandiri yang selanjutnya proses industrialisasi dapat

dilakukan tanpa bantuan dari negara lain. Selain itu pentingnya kebijakan open door policy bukan hanya sebatas transfer teknologi melainkan investasi mulai yang memasuki Cina melalui modal asing, sektor industri di Cina mulai terpacu yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan hasil broto produk industri setiap tahunnya. dan hal tersebut secara tidak langsung telah mampu menunjang pertumbuhan ekonomi hingga menjadikan Cina sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia yang mampu menyaingi dominasi Amerika Serikat. (Adhi, 2014)

Setelah diberlakukannya reformasi ekonomi dan pembuatan kebijakan terkait industri pada masa Deng Xiaoping, secara bertahap perekonomian China mulai tumbuh hal ini dibuktikan melalui peningkatan hasil bruto produk industri sebesar 10% setiap tahunnya pada periode (1978-2010) yang pada akhirnya berimbas pada pendapatan negara sebesar 8,7% setiap tahunnya. (Sulistyawati, 2012)

2. Non-inteference (non-intervensi)

Dalam berinvestasi dan memberikan bantuan, China cenderung tidak memperhatikan isu – isu atau masalah domestik yang ada di negara penerima seperti masalah Hak Asasi Manusia ataupun masalah demokrasi yang ada di dalam negara tersebut. Yang terpenting adalah kepentingan nasional nya tetap tercapai. Walaupun Nigeria marak dengan korupsi dan masalah kemiskinan, China tetap mau bekerjasama yang terpenting adalah kepentingan nasionalnya tetap tercapai seperti ucapan dari Denis Tull.

"You never hear the Chinese saying that they will not finished a project because the government has not done enough to tackle corruption. If they are going to build a road, then it will be built". (Tull, 2006)

Hal ini dikarenakan China memiliki kebijakan *Non*-Intervensi. Dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan menjalankan hubungan internasionalnya, China dikenal

sebagai negara yang mengedepankan prinsip *non* – intervensi, yakni, tidak turut campur dalam urusan domestik negara lain. (RRC, 2014)

Dengan menggunakan retorika prinsip *non* – intervensi terhadap urusan internal masing – masing negara, China berhasil merangkul negara – negara yang dianggap sebagai negara problematik oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lain, menjadi rekan kerjasama ekonomi yang menguntungkan. (Eisenman, 2007)

Beberapa negara yang dianggap bermasalah dalam hal politik oleh negara – negara Barat yang memiliki hubungan cukup erat dengan China adalah negara – negara di wilayah Afrika. (Sutter, 2008) Dalam hubungannya dengan negara – negara di Afrika, pemerintah China memberikan dukungan politik sepenuhnya kepada negara – negara tersebut walaupun pemerintahan negara – negara Afrika sering dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya oleh Amerika Serikat. Dukungan ini, misalnya, disampaikan oleh Presiden Hu Jintao dalam pidatonya di *Asia – Africa Business Forum 2005*, bahwa China sebagai negara berkembang ingin melakukan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara berkembang lainnya. China tidak pernah mempermasalahkan urusan domestik negara lain selama kerjasama ekonomi tetap berjalan. Bagi China sendiri setiap negara berhak mendapatkan persamaan status dan penghargaan terhadap kedaulatan dari negara lain. (Eisenman, 2007)

3. One Belt One Road (OBOR)

"Belt and Road" adalah sebuah inisiatif untuk kerja sama yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. "Belt/Sabuk" mengacu pada Sabuk Ekonomi dan Jalur Sutra mengacu pada Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. "Belt and Road" Initiative (BRI) adalah usaha ekonomi, diplomatik, geopolitik multifaset yang telah berubah melalui berbagai iterasi, dari "Jalur Sutra Modern" menjadi "One Belt One Road". China menginisiasi dan memimpin BRI dengan

program investasi 1,3 trilyun USD untuk menciptakan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan. Ini akan meningkatkan interkonektivitas ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di Eurasia, Afrika Timur, dan lebih dari 60 negara mitra. Pertama kali disusulkan pada September 2013, ini adalah inisiatif kebijakan luar negeri Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ini adalah proyek lingkup geografis dan keuangan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah umat manusia. (Kompasiana, 2017)

BRI memiliki dua komponen: Sabuk Ekonomi Jalur Sutra atau Silk Road Economic Belt (SREB) dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang berbasis laut. Bersama-sama kedua ini membentuk “sabuk” dan “jalan”. (*Belt and Road* / 一带一路). Selama lebih dari tiga tahun, jaringan infrastruktur darat SREB mencakup menghubungkan serangkaian proyek konstruksi “Belt and Road” utama telah dimulai satu demi satu. Enam koridor Ekonomi: Tiongkok-Mongolia-Rusia, New Eurasia Land Bridge serta Tiongkok-Asia Tengah-Asia Barat, Tiongkok-Semenanjung Indochina, Tiongkok-Pakistan, Banglades-Tiongkok-India-Myanmar. Konektivitas SREB akan terhubungkan jaringan pipa hydrokarabon, rel kereta api kecepatan tinggi. Jalur Sutra Maritim untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan utama yang terhubungkan dengan transportasi darat. (Kompasiana, 2017)

Proyek raksasa ini bukan semata persoalan jalur perdagangan dan ekonomi, tetapi lebih dari sekadar itu. China hendak memindahkan kegiatan produksinya ke luar negeri dengan menciptakan koridor ekonomi skala global yang membentang lebih dari 60 negara. Salah satu tujuannya ingin membantu negara lain dengan membangun basis industri. Sehingga, tak heran China sangat agresif menginvestasikan uangnya untuk pembangunan industri dan infrastktur di banyak negara. (Nusantara, 2017)

Pada Tahun 2017 “*Belt and Road*” China telah berkoordinasi dan merencanakan program “Dua Koridor dan

Satu Lingkar Ekonomi (*Two Corridors and One Economic Circle*)" juga bekerjasama dalam membuat program ekonmi dengan negara – negara seperti dengan Vietnam mebuat *"Rectangular Strategy"*, Kamboja dengan program *"Global Maritime Fulcrum"*, juga Indonesia dengan Proyek Pengembangan Sabuk Trans-Eurasia Rusia (*Russian's Trans-Eurasian Belt Development project*), dan inisiatif "Steppe Road" (Jalan Stepa) dengan Mongolia, untuk Kerjasama Teknik Multi Sektor dan Kerjasama Ekonomi. (Kompasiana, 2017)

Dalam tahun 2016, total perdagangan China dengan negara-negara di sepanjang "Belt and Road" mencapai 953,6 milyar USD, yang merupakan 25,7% dari total perdagangan global China. Saat ini *"Belt and Road"* telah menjadi produk masyarakat internasional terpopuler.

4. String of Pearls

String of pearls adalah sebuah istilah yang diberikan oleh tim ahli dari perusahaan konsultan Booz Allen yang berbasis di Amerika Serikat untuk menyebut strategi yang dilakukan China di sepanjang *Sea Lines of Communication* (SLOC) yang membentang dari Laut China Selatan hingga Samudera Hindia. SLOC (*Sea Lines of Communication*) adalah rute maritim antar pelabuhan-pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, pengiriman logistik dan angkatan laut. (Iswandari, 2013) Sedangkan menurut Christopher J.Pehrson, *String of Pearl* adalah:

The manifestation of China's rising geopolitical influence through efforts to increase access to ports and airfields, develop special diplomatic relationships, and modernize military forces that extend from the South China Sea through the Strait of Malacca, across the Indian Ocean, and on to the Arabian Gulf" (Christopher J, 2006)

String of pearls menghubungkan jalur laut mulai dari teluk Arab, melewati Samudera Hindia, Selat Malaka,

kemudian menuju laut China Selatan. Jalur *String of Pearls* menjadi jalur pengiriman utama impor dan ekspor minyak China. Jalur ini dipilih pemerintah China sebagai jalur yang paling utama untuk kegiatan ekspor dan impor karena jalur tersebut merupakan jalur tercepat yang menghubugkan China dengan negara-negara pengekspor energi bagi kebutuhan industri dalam negeri China.

Arti "*String*" mengacu pada rangkaian wilayah di sepanjang garis lepas pantai, sedangkan "*Pearls*" mengacu pada pelabuhan-pelabuhan strategis yang terletak mulai dari Pakistan (Gwadar *Port*), Sri Lanka (Hambantota *Port*), Bangladesh (Pelabuhan Kontainer di Chittagong), Burma (bentuk dukungan pada Burma sebagai suplier minyak), Kamboja (jalur transportasi kereta), dan Thailand (Kra Istmus). Dilihat dari fungsinya, *String of Pearl* memiliki tiga fungsi strategis, yang pertama adalah sebagai jalur pelayaran energi yang kebanyakan didominasi oleh minyak dan gas bumi, yang kedua adalah jalur pelayaran komersial yang digunakan sebagai rute perdagangan laut, sedangkan yang ketiga adalah dalam hal kepentingan militer dan politik. Dalam fungsi yang ketiga, pelabuhan-pelabuhan utama di sepanjang jalur *String of Pearls* tersebut, merupakan tempat yang strategis untuk membangun pangkalan yang disinyalir suatu saat dapat berubah menjadi menjadi pangkalan militer, sekaligus sebagai upaya *sphare of influence* China di sepanjang wilayah-wilayah *String*. Karena pada wilayah perairan-perairan tersebut pemerintah China menempatkan kekuatan militernya di sepanjang jalur *String of Pearls*. China menempatkan sejumlah pasukan militer serta peralatan militer yang canggih pada tiap-tiap pelabuhan dimana negara tersebut telah menjalin kerjasama. *String of Pearls* ini meliputi akses jalur *Sea-line* dan pelabuhan.

China menempatkan angkatan militernya disetiap pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di negara-negara di kawasan Samudera Hindia melalui strategi *String of Pearls* miliknya dengan langkah awal melakukan kerjasama dan memberikan bantuan infrastruktur. Adapun pangkalan-

pangkalan yang dibangun oleh China di kawasan Samudera Hindia yaitu Pakistan dengan pelabuhan Gwadarnya dimana China telah menempatkan pasukan AL militernya di pelabuhan Gwadar dengan langkah awal menjalin kerjasam ekonomi yaitu memberikan bantuan dana kepada pemerintah Pakistan dalam pengelolaan pembaruan pelabuhan Gwadar tersebut. Selain bantuan dana tersebut China juga memberikan pelatihan militer kepada pasukan militer Pakistan. Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka memberikan China tempat bagi kapal perang AL miliknya dan membangun kilang minyak, menyiapkan bandara dan fasilitas militer lainnya bagi China. Dan di pelabuhan Sittwe, Myanmar China telah memasok 100 tank ukuran sedang, 100 light tank, 24 unit pesawat tempur, 250 kendaraan militer, sistem peluncur roket, howitzer, senjata anti pesawat terbang dan keperluan militer ke Myanmar. (Christina Y, 2008)

5. Go Out Policy

Asisten Kementrian Perdagangan China Chen Jian menyebut *"Go Out Policy"* sebagai bentuk dukungan investasi China ke luar negeri. Kebijakan *"go out"* bertujuan untuk mencari ruang baru bagi perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi layak untuk meluaskan bisnisnya. Kebijakan ini terfokus pada pembelian sebagian aset maupun ekuitas perusahaan kilang minyak yang sedang berkembang. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan biaya eksplorasi di kilang minyak baru.

Melalui kebijakan *Go Out Policy*, pemerintah China meluncurkan beberapa skema insentif membantu perusahaan nasional mereka, utamanya BUMN, dalam memanfaatkan semakin terbukanya pasar regional dan global. Upaya sistematis dan kelembagaan membuat banyak perusahaan China yang tadinya hanya pemain lokal menjelma menjadi perusahaan multinasional, terus tumbuh dan membanggakan (*flag flyer*) bahkan banyak yang masuk dalam 500 Fortune. (Huijun, 2007)

Sejumlah insentif dan kebijakan diluncurkan Pemerintah China pada saat itu ditujukan untuk meningkatkan investasi perusahaan dalam bentuk foreign-direct- investment (FDI), diversifikasi produk dan pasar perusahaan China di luar negeri, meningkatkan kualitas produk berstandar internasional, dan memperluas aksesibilitas pembiayaan (financing) di pasar internasional. (Huijun, 2007)

Kebijakan ekonomi luar negeri China selama ini sering berubah mengikuti perubahan - perubahan strategis dan prioritas China terhadap negara lain. Dengan kebijakan dan strategi ekonominya China dapat mencapai kepentingan – kepentingan nasionalnya. Maka dari itu banyak kebijakan serta strategi ekonomi China yang bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan kebijakan dan strategi tersebut China mempunyai motif tersendiri untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui kebijakan ekonomi luar negeri.